

**STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
(Studi Pada SDN Di Wilayah Kelurahan Lamekongga
Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)**

MUH. ZAENAL AM.

Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara

Abstract

Autonomy and decentralization policy of education of course very suitable with democratic principles, but which we have to concern is whether local government can provide educational services with the adequate quality. It is important to note because of the inproportionale ability condition between each local governments. Referring to this matter, The Minister of National Education have made decision number 053 year 2001 concerning guidance compilation of Minimum service standard for Elementary educational and Middle school management. Execution of this standard in the regional sub-district Lamekongga have been well done. There are at least four factors affecting namely communications, resource, disposition, and structure of bureaucracy.

Keywords: *Minimun Service Standard, education, outonomy*

Pendahuluan

Pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah tetapi juga oleh swasta. Sebagaimana yang dikenalkan dalam konsep *reinventing government* yang dipromosikan oleh Osborne dan Gabler untuk semakin mendorong pelimpahan pelayanan publik ke tangan pihak ketiga baik swasta ataupun masyarakat dengan harapan dapat memindahkan monopoli atas pelayanan dari pemerintah kepada swasta. Namun dalam implementasinya seringkali menimbulkan masalah baru. Hal ini terjadi karena, pelayanan publik yang diselenggarakan pihak swasta umumnya membawa konsekwensi pada tingginya biaya yang harus ditanggung sehingga masyarakat miskin tidak mampu mengakses layanan tersebut.

Pelayanan publik di Indonesia jika ditelaah memiliki beberapa permasalahan mendasar. *Pertama*, masih rendahnya kualitas produk layanan dan penyelenggaraan layanan. Rendahnya kualitas dapat terlihat dalam beberapa pelayanan sosial dasar seperti air bersih, lingkungan yang sehat, kesehatan,

pendidikan dan transportasi massa. Prosedur yang berbelit-belit, biaya mahal, dan belum jelasnya standar pelayanan merupakan ciri umum penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Kedua, keterbatasan akses layanan bagi kelompok rentan, penyandang cacat dan komunitas di daerah terpencil. Aksesibilitas pelayanan publik bagi kelompok penyandang cacat sangat minim. Hampir semua sarana dan prasarana publik, seperti jalan, gedung, toilet umum, jembatan penyeberangan, terminal, transportasi umum, lembaga pendidikan dan lain sebagainya, tak mempunyai fasilitas bagi penyandang cacat.

Ketiga, belum berjalannya mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Keluhan masyarakat belum dianggap penting, sehingga apabila terdapat komplain atau sengketa antara masyarakat dengan penyelenggara layanan seringkali pihak masyarakatlah yang berada pada posisi lemah.

Keempat, belum berkembangnya ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan. Selama ini pelayanan publik masih menggunakan pendekatan top-down atau sepihak, sementara masyarakat masih diposisikan sebagai obyek.

Demikian pula di bidang Pendidikan sebagai salah satu pelayanan sosial dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah terhadap warganya, namun sejauh ini kualitas pelayanan pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah masih jauh dari harapan masyarakat. Masih rendahnya pelayanan di bidang pendidikan tersebut terpantau melalui ketidakmarataan pelayanan dan fasilitas pendidikan di setiap daerah khususnya pada sekolah-sekolah negeri, ketidakmerataan jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan lain sebagainya.

Keadaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi kualitas pendidikan dan siswa yang diluluskannya. Merosotnya dunia pendidikan di Indonesia, dimulai rendahnya peringkat Indonesia —peringkat ke 12 di Asia— dalam hal penyelenggaraan pendidikan (Mendiknas 2001), rendahnya kemampuan membaca pada murid SD, kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, yang kemudian bermuara pada rendahnya mutu sumber daya manusia di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan (www.depdiknas.go.id) dan masih banyak lagi permasalahan yang ada di dunia pendidikan Indonesia.

Banyak pertentangan dalam mencari penyebab kemerosotan dunia pendidikan di Indonesia, namun banyak pihak yang menyatakan bahwa sejumlah kebijakan pusat yang dianggap membatasi kreativitas daerah dengan menerapkan sistem pendidikan yang sentralistik. Inisiatif menjadi hal langka karena pihak sekolah dan guru cenderung bersifat pasif, semesta bekerja atas dasar petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah.

Dari kondisi inilah muncul gagasan agar pengelolaan pendidikan didesentralisasikan. Selain untuk menjawab berbagai titik lemah dalam sistem

sentralisasi, terutama pada tingkat pendidikan dasar yang selama ini tidak efektif dan efisien, gagasan desentralisasi dilandasi pemikiran untuk lebih mengakomodasi semangat demokrasi dalam pendidikan. Desentralisasi pendidikan diyakini merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di masa depan, sekaligus mengeliminir berbagai kelemahan dan dampak negatif dari sistem yang sentralistik.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan tentu sangat sesuai dengan azas demokrasi di bidang pendidikan, namun yang perlu diwaspadai adalah apakah daerah sudah mampu menyelenggarakan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang memadai. Terutama jika dilihat dari kondisi kemampuan masing-masing daerah yang tidak berimbang satu sama lain. Sehubungan dengan hal ini, Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Keputusan Nomor 053 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. SPM Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ini adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal, yang wajib dilakukan oleh daerah kabupaten dan daerah kota dalam penyelenggaraan kegiatan persekolahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pedoman SPM ini merupakan usaha besar yang patut diberi apresiasi. Apresiasi ini didasarkan hal-hal sebagai berikut (Kompas, 2 Nopember 2001): *Pertama*, kita menyadari betapa pentingnya menyiapkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan. *Kedua*, kebijakan politik desentralisasi dan otonomi membawa implikasi positif ke arah desentralisasi pendidikan dan pemberdayaan sekolah sebagai satuan pelaksana pendidikan yang paling strategis.

Dalam perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Kolaka, kinerja pemerintah Kabupaten Kolaka dalam pelayanan di bidang pendidikan memiliki keberhasilan pencapaian sasaran program. Dari enam sasaran program, lima diantaranya dicapai dengan baik, program-program yang dicapai tersebut antara lain program peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pengelolaan manajemen pendidikan, pembinaan prestasi olahraga, pengembangan dan pemberdayaan pemuda serta kegiatan pendidikan luar sekolah.

Dengan adanya penilaian tersebut, kiranya memberikan gambaran akan telah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Kolaka. Namun demikian perlu dikaji lebih seksama apakah perkembangan kualitas pelayanan pendidikan tersebut sudah sesuai dengan Standar pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebagaimana diatur dalam KEPMENDIKNAS No. 053 Tahun 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Disamping itu, perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis, karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM. Prinsip-prinsip penyusunan SPM antara lain:

- 1) SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
- 2) SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- 4) SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
- 5) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh daerah kabupaten dan daerah kota dalam menyelenggarakan kegiatan persekolahan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Dimana kegiatan persekolahan di bidang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: Taman Kanak-Kanak (TK); Sekolah Dasar (SD); Sekolah Dasar (SD); Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); Sekolah Menengah Umum (SMU); Sekolah menengah Kejuruan (SMK); dan Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Lebih jauh Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah atau SPM Persekolahan bidang

Pendidikan Dasar dan Menengah didalamnya memuat tentang standar kompetensi, standar kurikulum/program kegiatan belajar, standar peserta didik, standar ketenagaan, standar sarana dan prasarana, standar organisasi, standar pembiayaan, peran serta/keikutsertaan masyarakat, manajemen sekolah dan indikator keberhasilan.

Standar kompetensi berisi kemampuan minimal yang diharapkan dari peserta didik. Kurikulum/program kegiatan belajar berisi susunan program pengajaran, materi pelajaran, strategi belajar mengajar, bahasa pengantar, penilaian dan bimbingan belajar. Standar peserta didik ini meliputi jumlah anak didik/siswa perkelas, persyaratan sebagai anak didik/siswa, pakaian anak didik/siswa, dan unit kegiatan siswa. Ketenagaan antara lain berisi jenis tenaga, perhitungan kebutuhan tenaga, persyaratan, dan jam wajib mengajar. Sarana dan prasarana berisi sarana dan prasarana minimal yang harus ada dalam penyelenggaraan kegiatan/program yang meliputi lahan ruang perabot, alat dan media pendidikan. Organisasi berisi susunan dan bagan organisasi. Pembiayaan, berisi komponen penyelenggaraan kegiatan/program yang harus dibiaya dan sumber pembiayaan, pengelolaan pembiayaan, auditing dan pelaporan. Peran serta masyarakat berisi bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan/program. Manajemen sekolah berisi hal-hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah bersama dewan guru dan warga sekolah lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Indikator keberhasilan berisi tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan kegiatan/program.

Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kelurahan Lamekongga Kabupaten Kolaka

SDN 1 dan SDN 2 Lamekongga berada di Jl. Raya Wundulako Desa Gudang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Sekolah dengan nomor statsistik 101052313023 memiliki status tanah milik sendiri, sebesar 14.898 M² dipergunakan sebagai sumberdaya pendukung kegiatan operasional sekolah. Secara umum, jumlah siswa pada SDN 1 dan SDN 2 Lamekongga relatif banyak. Adapun distribusi jumlah siswa ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Siswa SDN 1 dan SDN 2 Lamekongga

No	∑ Siswa	Murid	Jumlah
----	---------	-------	--------

		L	P	
1	Kelas 1	27	28	55
2	Kelas 2	20	30	50
3	Kelas 3	25	31	56
4	Kelas 4	30	20	50
5	Kelas 5	27	20	47
6	Kelas 6	18	34	52
	Jumlah	147	163	310

Sumber: Profil SDN 1 dan SDN 2 Lamekongga, 2008

Dalam rangka menganalisis implementasi kebijakan KEPMENDIKNAS No. 053 Tahun 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, dipergunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III yang meliputi: variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki andil yang besar dalam keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Melalui komunikasi, tujuan dari program dapat tersampaikan kepada para implementor dan masyarakat umum (*target group*). Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan. Dalam hal ini perlu ditinjau sejauh mana tingkat penerimaan aparat pelaksana maupun kelompok sasaran atas informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

Hood (1976) menyatakan bahwa guna mencapai penyelenggaraan sistem administrasi yang terpadu (*unitary administrative system*) harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara pelbagai unsur atau badan yang terlibat dalam pelaksana kebijakan sehingga tujuan kebijakan dapat benar-benar tercapai. Bagaimanapun juga tingkat keberhasilan dari suatu program tergantung pada sejauhmana tingkat efektifitas sosialisasi atas program yang dijalankan. Oleh karena itu tingkat keberhasilan dari program Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dipengaruhi pada keefektifan sosialisasi atas program.

Dalam pelaksanaan kebijakan Standard Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah telah dilakukan berbagai jalur sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka yaitu 2 orang pengawas Dikmenum Kabupaten Kolaka dan Aparat sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua urusan, guru-guru dan segenap karyawan sekolah. Langkah sosialisasi mengenai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang Standard Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang

Pendidikan Dasar dan Menengah sangat dominan karena pihak sekolah (SDN 1 dan SDN 2 Lamekongga) sebagai penyelenggara dengan mengundang nara sumber dari Pengawas Dikmenum Kabupaten Kolaka sebagai pematery. (Sumber: data primer, Cabang Dinas Pendidikan Lamekongga, 2007).

Sedangkan mengenai sosialisasi yang diadakan di sekolah dilaksanakan dengan mengundang para orang tua siswa dan anggota Komite Sekolah. Ibu Miswartik selaku kepala sekolah yang menyatakan sebagai berikut:

“Kita memang telah melakukan sosialisasi pada orang tua dan masyarakat pada tanggal 15 November 2004 lalu, namun setiap tahun ajaran baru kami selalu menyampaikannya kembali kepada orangtua siswa, khususnya orang tua siswa baru. Dukungan masyarakat maupun pihak Komite Sekolah cukup baik, dan ini menjadi peluang kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut” (Wawancara tanggal 20 Mei 2008).

Hal senada yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan ditanggapi oleh Ketua Komite Sekolah SDN 1 Lamekongga yang menyatakan sebagai berikut:

“Cukup baik pak... pelaksanaan sosialisasi oleh pihak sekolah sangat informatif dalam menginformasikan program dari pemerintah tersebut ternyata tidak terlalu banyak perbedaan substansinya dibandingkan dengan SK Mendiknas terdahulu. Pihak orang tua dan komite sekolah sepakat untuk mendukung program tersebut, karena bagaimanapun program tersebut bertujuan baik untuk memberikan pelayanan pendidikan sebaik-baiknya pada masyarakat.” (Wawancara tanggal 20 Mei 2008).

Dengan adanya pemahaman yang sama dari kelompok sasaran akan isi program, menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak dalam pelaksanaan SK Mendiknas No. 053/U/2001 tentang Standard Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah berjalan secara efektif.

b.Sumber daya

Hal yang juga penting akan keberhasilan dari suatu kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya dalam rangka memperlancar proses administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber ini terdiri dari adanya ketersediaan dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan. Dalam SK Mendiknas No. 053/U/2001 dilaksanakan dengan disertai rencana pengembangan sekolah yang telah dipersiapkan secara maksimal dimana dalam rencana pengembangan tersebut juga mencakup sumber-sumber daya yang diperlukan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber dana.

Paparan mengenai pelaksanaan program SK Mendiknas No. 053/U/2001 di lokasi penelitian memperlihatkan bahwa adanya 3 pihak sentral yang mampu menciptakan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di sekolah. Adapun pihak sentral ini adalah:

- a. Pihak sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru dan staf administrasi.
- b. Pihak Masyarakat melalui komite sekolah.
- c. Siswa sebagai kelompok sasaran

Pelaksanaan SK Mendiknas No. 053/U/ di kelurahan lamekongga ini memiliki dukungan yang relatif baik dari berbagai pihak yang terlibat. Dari data empiris, secara umum jumlah guru pada SDN 1 Lamekongga dan SDN 2 Lamekongga ini relatif cukup, dalam artian setiap kelas dan beberapa mata pelajaran khusus (PAI, pendidikan jasmani, musik dan komputer). Bahkan terdapat guru sukarelawan yang siap menggantikan salah satu guru apabila berhalangan hadir atau karena hal lainnya. Selain itu mengenai tingkat pendidikan, para guru SDN 1 Lamekongga Kecamatan Wundulako lumayan tinggi, bahkan sebagian besar guru tengah menempuh pendidikan di jenjang lebih tinggi. Berikut penjelasan yang didapat melalui wawan cara dengan Kepala SDN 1 Lamekongga:

“Jumlah guru di sekolah ini bisa dibilang cukup memadai. Bahkan untuk meningkatkan standar banyak para guru yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, kira-kira sekitar 7 orang yang sedang menempuh jenjang strata satu.” (Wawancara tanggal 20 Mei 2008).

Sejumlah hal yang menjadi perhatian khusus dalam menentukan tercapainya SPM tersebut, yaitu anggaran pendidikan. Sebagai contoh, untuk menyediakan, menyebarkan dan melaksanakan kurikulum nasional dan lokal, sampai dengan tercapainya daya serap tertentu, memerlukan biaya yang besar. Dan untuk meningkatkan kualitas minimal sarana prasarana, yaitu lahan, bangunan, perabot, peralatan/ lab/media, buku teks, sarana olahraga dan infrastruktur yang harus lengkap, tentunya juga membutuhkan biaya yang besar sekali. Begitu pula, tingkat kehadiran guru yang tinggi dapat dicapai apabila mereka menerima gaji yang cukup, supaya tidak perlu lagi mencari tambahan penghasilan di luar sekolah.

Dalam hal penggalangan dan pengelolaan pendanaan masih menemui sedikit kendala, dimana hasil swadaya masyarakat ---berupa sumbangan pendidikan--- dirasa masih belum mampu untuk *mengcover* seluruh pendanaan kegiatan. Menyikapi hal tersebut pihak sekolah dan komite sekolah melakukan pembangunan dan penambahan sarana dan prasara dengan bertahap, serta

pencarian dana melalui sumbangan dari pemerintah. Selama tahun pelajaran 2005/2006 perkembangan yang telah ditempuh oleh SDN 1 Lamekongga ini dalam hal penyediaan fasilitas fisik adalah sebagai berikut:

1. Penataan halaman depan
2. Penggantian mebelair siswa 2 ruang kelas.
3. Pengadaan Sound Sistem 1 unit
4. Pengadaan media audio visual
5. Penggantian mebelair siswa 2 ruang kelas.
6. Pengadaan Sound Sistem 1 unit
7. Pengadaan media audio visual (Sumber: Profil SDN 1 Lamekongga).

Paparan diatas menyiratkan bahwa dukungan finansial untuk pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah relatif masih kurang memadai namun tetap diusahakan untuk menambahkan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap.

c.Sikap Pelaksana

Sikap petugas di lapangan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan, karena merekalah yang mengoperasionalkan program, disamping itu kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/ petugas pelaksana dilapangan juga dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam hal ini adalah para guru dan komite sekolah menunjukkan kemauan yang keras dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap sekolah baik para pelaksana di SDN 1 Lamekongga maupun SDN 2 Lamekongga. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan di wilayah Kelurahan Lamekongga (SDN 1 Lamekongga dan SDN 2 Lamekongga) Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka ini instansi/organisasi yang terlibat sedikitnya dua pihak, yakni Sekolah dan perangkatnya serta Komite Sekolah sebagai representasi perwakilan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, keduanya berkolaborasi dalam menentukan arah kebijakan sekolah berupa penentuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS merupakan rancangan kegiatan sekolah dalam menjalankan kegiatan atau program dalam tahun anggaran berjalan. (Sumber : Data primer diolah, 2008)

Implementasi suatu kebijakan tidak hanya membutuhkan serangkaian tahapan tertentu, melainkan juga komitmen sejumlah aktor terhadap kesepakatan tujuan atau sasaran yang akan di capai. Tujuan tersebut haruslah dirumuskan secara jelas, spesifik dan lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan implementasi SK Mendiknas No. 053/U/2001 pada Lembaga Pendidikan Dasar di wilayah

Kelurahan Lamekongga, pedoman pelaksanaan yang ada memuat penjabaran tujuan-tujuan dari kebijakan serta indikator pengukuran (Sumber: Data primer diolah, 2008). Selain itu juga adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar yang ditandai dengan realisasi kegiatan pembangunan serta adanya rencana penambahan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarananya pada setiap tahun anggaran. (Sumber: Data primer diolah, 2008).

Tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan program atau kebijakan secara tepat sudah tentu di pundak staf administrasi dan petugas di lapangan, termasuk diantaranya para perancang dan pembuat kebijakan, sebab merekalah yang pada umumnya telah dibekali dengan sejumlah kemampuan teknis administrasi tertentu, semisal *network planning and control*, *manpower forcecasting*, dan *inventory control*, sehingga dapat diharapkan bahwa sejak dini setiap hambatan yang bakal terjadi dapat diantisipasi/diperkirakan sebelumnya, dan tindakan yang cepat dan tepat dapat segera dilakukan.

Hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan menggambarkan bahwa sikap para pelaksana dalam melaksanakan SK Mendiknas No. 053/U/2001 pada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar di wilayah Kelurahan Lamekongga menunjukkan yang positif, yaitu ikut serta dalam peningkatan kualitas tenaga pengajar, dalam pelaksanaan dan manajemen sekolah serta dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

d.Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah diselenggarakan secara interdepartemental yakni melibatkan beberapa departemen terkait. Namun patut pula dicatat bahwa departemen-departemen itu masih berada di dalam satu lingkup birokrasi pemerintah sehingga tidak ada perbedaan yang fundamental antar organisasi pelaksana.

Analisis Keberhasilan

Dalam pelaksanaan SPM terdapat panduan berupa matriks pengukuran tingkat keberhasilan, mengingat lingkup penelitian berada pada tataran sekolah, maka indikator keberhasilan disesuaikan dengan kewenangan yang ada. Adapun matriks tingkat keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Matrik Indikator Keberhasilan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Komponen SPM	Indikator	Ketercapaian Minimal	Keterangan
1.	Kurikulum	1 Ketersediaan kurikulum nasional	Ada (set/SD)	Penggunaan KBK

		2	Tersebarnya kurikulum local	Ada (set/SD)	Muatan lokal
		3	Keterlaksanaan kurikulum nasional	100%	Mulai tahun 2002
		4	Keterlaksanaan kurikulum local	100%	Mulai tahun 2002
		5	Prosentase daya serap kurikulum nasional	100%	
		6	Prosentase daya serap kurikulum local	100%	
2.	Anak Didik	1	Angka pendaftaran siswa	Meningkat	
		2	Angka Putus Sekolah (APS)	Menurun	Siswa sampai lulus
		3	Angka Mengulang (AMK)	Menurun	Mencapai 0 %
		4	Survival Rate	Meningkat	Sampai lulus
		5	Prosentase kelulusan	Meningkat	Mencapai 100%
3.	Ketenagaan	1	Kinerja kepala sekolah	Ada	Berupa lap. bulanan
		2	Prosentase guru berkualifikasi	90%	Spesifikasi 90%
		3	Prosentase guru berkeahlian	80%	
		4	Rasio guru dengan siswa	1 : 21,4	16 Guru dg 342 siswa
4.	Sarana dan Prasarana	1	Lahan	Ada	Milik sendiri
		2	Bangunan	Ada	6 ruang kelas 6 lainnya
		3	Peralatan/lab/Media	Ada	Lab. Komputer
		4	Buku teks siswa	1:1	Tiap siswa memiliki
		5	Sarana olahraga	Ada	Lap.dan peralatan
5.	Organisasi	1	Struktur	Ada	Lengkap
		2	Personalia	Ada	Dirangkap kepala sekolah
		3	Uraian tugas	Ada	Lengkap
6.	Pembiayaan	1	Anggaran pemerintah	Ada	Berupa BOS
		2	Anggaran swadaya	Ada	Sumbangan pemb.sekolah
7.	Peran Serta Masyarakat	1	Peran serta dalam kegiatan/program sekolah	Ada	Pendanaan, Pengambilan Keputusan program sekolah
8.	Manajemen Sekolah	1	Tingkat kehadiran guru	100%	Lap. bulanan
		2	Tingkat kehadiran tenaga adminisrasi	100%	Dlm lap. Bulanan
		3	Tingkat kehadiran siswa	90%	
		4	Tertib administrasi	90%	
		5	Kinerja sekolah	90%	

Sumber: Data primer dan skunder, diolah. 2008

Dengan mengamati tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir seluruh indikator penilaian menunjukkan angka positif, yaitu hampir semua menunjukkan diatas standar minimal. Hanya ketersediaan lab. saja yang masih minimal, yaitu hanya tersedia laboratorium computer saja. Namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja yang ada pada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar di wilayah Kelurahan Lamekongga (SDN 1 Lamekongga dan SDN 2 Lamekongga) dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan menunjukkan positif dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya pada Lembaga Pendidikan Dasar di wilayah Kelurahan Lamekongga (SDN 1 Lamekongga dan SDN 2 Lamekongga) ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Langkah sosialisasi dan komunikasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di lokasi penelitian berjalan maksimal. Hal ini mengingat kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ditindaklanjuti hingga tingkat lokal (sekolah) melalui jalur sosialisasi memberikan pemahaman yang kondusif baik bagi guru maupun bagi masyarakat.
- 2) Sumberdaya pendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di lokasi penelitian relatif cukup. Kecukupan sumber daya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ini meliputi kecukupan aparat pelaksana khususnya ketersediaan guru.
- 3) Masyarakat memberikan kontribusi yang positif bagi pelaksanaan program yang terbukti dari adanya beberapa bentuk partisipasi mereka terhadap sekolah. Kondisi ekonomi tidak mempengaruhi partisipasi mereka bagi pendidikan anak.
- 4) Indikator pengukuran standar minimal pelayanan pendidikan menunjukkan sesuatu yang positif, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan Kep. Mendiknas No. 053/U/2001 khususnya pada Lembaga Pendidikan Dasar di wilayah Kelurahan Lamekongga (SDN 1 Lamekongga dan SDN 2 Lamekongga) Kecamatan Wundulako menunjukkan keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholichin, 1990, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Empirik, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1990, Pendekatan Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asih Asah Asuh, Kolaka.
- Den Berght, Vren, 1980, Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta.
- Grindle, Merilee S, 1980, Politic and Implementation in The Third World, Pricenton University Press, New Jersey.
- Hadi, Sutrisno, 1994, Metodologi Research Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta.
- Islami, Irfan, 1994, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koentjoroningrat, 1981, Metodologi Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Mattew, Milles & Huberman, 1987, Qualitatif data Analisis A Sources Miles Book of New Methodes, Sage Publication, London.
- Nazir, Muhammad, 1998, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wibowo, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan, Persada, Jakarta.